

Peran BAPEMDA dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Banjarnegara

The Role of BAPEMDA in Supervising The Election of The Head of Banjarnegara Village

Aldi Lutfi, Zufar Hafiz, Ilham Maulana, Fatkhuri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Info Artikel

Diterima : 25 November 2024
Direvisi : 13 Desember 2024
Disetujui : 27 Desember 2024

Kata kunci:

BAPEMDA
Demokrasi Lokal
Pemilihan Kepala Desa

Keywords:

BAPEMDA
Local Democracy
Village Elections

Corresponding Author :

Aldi Lutfi, Zufar Hafiz, Ilham
Maulana, Fatkhuri
aldilutfiabidin2003@gmail.com
zufarhafiz2004@gmail.com
maulana4157@gmail.com
fatkhuri@upvvnj.ac.id
082125958854

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dan tantangan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan, klasifikasi, dan penyajian data untuk memberikan gambaran yang jelas. Analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAPEMDA memainkan peran strategis dalam memastikan pemilu yang adil dan damai di Desa Banjarnegara, tetapi menghadapi tantangan seperti korupsi, konflik kepentingan, dan kurangnya mekanisme pengawasan. Reformasi kelembagaan, pedoman etika, pelatihan, dan insentif yang memadai diperlukan untuk meningkatkan integritas BAPEMDA dan memastikan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Abstract

The purpose of this study is to analyse the role and challenges of the supervisory function of the Village Consultative Body (BAPEMDA) in village head elections. This research uses qualitative methods to understand social phenomena in depth. The data source used is secondary data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman method, including data collection, classification, and presentation to provide a clear picture. Descriptive analysis was used to interpret the data that had been collected to support the research results. The results concluded that BAPEMDA plays a strategic role in ensuring fair and peaceful elections in Banjarnegara Village, but faces challenges such as corruption, conflicts of interest, and lack of oversight mechanisms. Institutional reform, ethical guidelines, training, and adequate incentives are needed to improve BAPEMDA's integrity and ensure the quality of democracy at the local level.

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) di Banjarnegara memperlihatkan adanya potensi untuk menguatkan partisipasi seluruh kelompok. Namun, survei lokal menemukan bahwa keterlibatan BAPEMDA

sering kali lebih terfokus pada pengawasan teknis pemilihan, dengan 65% anggota BAPEMDA menyatakan bahwa mereka lebih sering berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan daripada fasilitator dialog (Suryadi, 2022).

Akibatnya, suara kelompok marginal cenderung tidak terwakili dengan optimal dalam forum-forum resmi desa, terutama dalam pengambilan keputusan penting pasca pemilihan.

Dengan meningkatnya partisipasi warga yang mencapai lebih dari 80% pada pemilihan kepala desa terakhir (Setiawan, 2022), terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Pendekatan yang lebih deliberatif dapat memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok ekonomi rendah, memiliki kesempatan setara untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Jika tidak, tradisi “botoh” berisiko menjadi praktik yang memperkuat *status quo* tanpa mewakili kebutuhan dan aspirasi semua elemen masyarakat.

Selanjutnya, peran BAPEMDA dalam menjembatani komunikasi antara calon dan masyarakat juga harus diperhatikan. BAPEMDA tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong proses deliberasi yang sehat dan inklusif. Melalui mekanisme yang mereka kembangkan, diharapkan BAPEMDA dapat memberikan ruang bagi semua kelompok untuk terlibat dalam diskusi, memastikan bahwa tidak ada suara yang terabaikan. Dalam hal ini, analisis mengenai seberapa efektif BAPEMDA dalam menjalankan perannya ini menjadi penting untuk memahami dinamika politik di Desa Banjarnegara (Sari, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena di Desa Banjarnegara ini mencerminkan tantangan dan potensi yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Meskipun sistem demokrasi elektoral telah diterapkan, masih ada kebutuhan untuk memperkuat model-model deliberatif yang memberikan ruang bagi diskusi dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Tradisi “botoh” dapat dilihat sebagai salah satu contoh konkret di mana elemen-elemen tradisional dapat diintegrasikan ke dalam proses demokrasi modern, menghasilkan kombinasi yang berpotensi memperkaya praktik demokrasi di tingkat lokal (Suharno, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk mendalami lebih jauh bagaimana kontestasi elektoral di Desa Banjarnegara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai arena di mana nilai-nilai demokrasi deliberatif dapat diwujudkan. Dengan mempertimbangkan peran institusi seperti BAPEMDA, kita dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat desa dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih.

Analisis ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai dinamika lokal, tetapi juga menyajikan pelajaran berharga bagi praktik demokrasi di daerah lain di Indonesia yang memiliki konteks budaya yang serupa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan model-model praktik demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, yang tidak hanya mengandalkan mekanisme elektoral semata, tetapi juga mengedepankan dialog, pemahaman, dan kolaborasi antara pemimpin dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara tradisi, institusi, dan praktik demokrasi di tingkat lokal, serta implikasinya bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pemilihan kepala desa di Desa Banjarnegara, peran Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) menjadi sangat krusial, terutama dalam menjaga ketertiban hukum dan politik. Sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat, BAPEMDA tidak hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara calon kepala desa dan warga. Dalam konteks ini, keberadaan BAPEMDA sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Hal ini akan memberikan legitimasi yang lebih kuat

terhadap hasil pemilihan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BAPEMDA menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Memahami langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga ini untuk memastikan keadilan dalam pemilihan sangat penting. Misalnya, bagaimana BAPEMDA melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk manipulasi suara maupun tindakan intimidasi terhadap pemilih. Dengan menganalisis proses ini, kita dapat menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan dan bagaimana BAPEMDA mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang independen dan akuntabel.

Rumusan masalah pertama untuk memecahkan *research question* tersebut adalah: "Bagaimana peran pengawasan BAPEMDA dalam memastikan ketertiban dan keadilan dalam pemilihan kepala desa?" Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diambil oleh BAPEMDA dalam proses pengawasan. Selain itu, penting juga untuk memahami sejauh mana BAPEMDA berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti panitia pemilihan, untuk mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran. Hal ini juga mencakup bagaimana BAPEMDA mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan lebih aktif dan cerdas dalam proses pemilihan.

Rumusan masalah kedua adalah: "Apa saja tantangan yang dihadapi BAPEMDA dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Banjarnegara?" Dengan menggali tantangan yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tantangan ini bisa berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Misalnya, dalam konteks internal, kurangnya sumber daya manusia atau pelatihan yang memadai bagi anggota BAPEMDA bisa menjadi kendala yang signifikan. Di sisi lain, tekanan politik dari calon kepala desa yang bersaing, atau pengaruh kelompok tertentu dalam masyarakat, juga dapat

menciptakan situasi yang sulit bagi BAPEMDA untuk bertindak secara objektif dan independen.

Dengan menjawab kedua rumusan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran BAPEMDA dalam pemilihan kepala desa di Desa Banjarnegara. Analisis mendalam mengenai mekanisme pengawasan dan tantangan yang dihadapi akan menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi yang bermanfaat, baik bagi BAPEMDA maupun bagi sistem pemilihan secara keseluruhan. Ini penting untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif di tingkat desa.

Pentingnya pemahaman mengenai peran BAPEMDA juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas tentang demokrasi di Indonesia. Pasca-reformasi, meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam hal pemilihan umum, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik di tingkat lokal. Dalam hal ini, BAPEMDA berpotensi menjadi garda terdepan dalam memperkuat praktik demokrasi, terutama di desa-desa yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik. Dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, BAPEMDA dapat membantu warga untuk lebih menyadari hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan berbagai model praktik yang dapat meningkatkan efektivitas BAPEMDA dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada peran BAPEMDA dalam konteks pemilihan kepala desa, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat institusi ini. Selain itu, hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori demokrasi lokal, terutama dalam mengaitkan tradisi dan praktik politik di masyarakat dengan mekanisme pengawasan yang lebih formal.

Analisis yang komprehensif terhadap mekanisme pengawasan dan tantangan yang dihadapi BAPEMDA di Desa Banjarnegara ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya dan praktik terbaik dalam pengawasan pemilihan di tingkat desa lainnya. Dengan memahami peran BAPEMDA secara mendalam, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pemilihan kepala desa, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi secara keseluruhan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk tulisan maupun bahasa, serta perilaku subjek yang diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang perspektif partisipan tentang realitas sosial (Bogdan & Biklen, 1992). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dalam lingkungan alamiahnya. Untuk melakukan hal ini, data deskriptif yang komprehensif harus dikumpulkan, data harus dianalisis secara induktif, dan interpretasi yang sesuai dengan konteks harus disusun. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan secara naratif hasil dan implikasinya.

Sumber data merujuk pada asal data yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari sumber data dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengatasi masalah, maka sumber data sangat penting dalam penelitian. Untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami, data harus diproses untuk menjamin kebenaran dan keakuratan informasi. Proses triangulasi-pemeriksaan berkali-kali dan dari berbagai sumber digunakan untuk menilai keandalan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut dengan data sekunder,

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh organisasi atau individu untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan mereka sendiri (Arikunto, 1998). Maka, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, artikel, dan karya literatur lainnya, serta dari dokumen yang memeriksa sejarah dan peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data dari sumber data sekunder meliputi beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya. Metode yang paling banyak digunakan adalah tinjauan literatur, yang dilakukan dengan mencari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti dapat mempelajari studi terkait, hipotesis yang mendasari, dan referensi yang relevan untuk pekerjaan mereka dengan melakukan tinjauan literatur. Selain itu, data sekunder dapat diperoleh peneliti melalui dokumentasi, yang meliputi bukti transaksi, catatan, dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis dokumen, yang mencakup melihat laporan, catatan, dan materi terkait penelitian lainnya, dapat digunakan untuk menemukan dokumentasi ini (Haryati, S. 2012). Untuk menjaga validitas data penelitian, peneliti memastikan keandalan sumber data saat mengumpulkan data sekunder.

Penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis data Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan mengumpulkan data terkait dengan penelitian, dimana proses klasifikasi melibatkan pemilahan dan perampangan data untuk memberikan gambaran yang lebih tepat yang akan membuat penelitian dari pengumpulan data sebelumnya menjadi lebih mudah. Tahap berikutnya yaitu *data display*. Setelah dikumpulkan dan juga diklasifikasikan maka data tersebut ditampilkan ataupun disajikan

untuk bisa lebih memahami maksud dari materi ini. Peneliti juga menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Dalam menggunakan data sekunder, analisis deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data yang diperoleh dari kajian literatur yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BAPEMDA

BAPEMDA memiliki peran penting dalam pemilihan umum di desa-desa. Peran BAPEMDA dalam pemilihan umum di Jawa Tengah khususnya Desa Banjarnegara memiliki beberapa peran utama. BAPEMDA sebagai salah satu instrumen pemerintahan dalam kehidupan bernegara di lingkup daerah, memiliki peranannya tersendiri bagi kehidupan demokrasi di suatu daerah. Di Desa Banjarnegara dengan tradisi yang tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dijadikan satu kebiasaan baik dalam pesta demokrasi di Banjarnegara, tradisi tersebut bernama “botoh”.

Di Desa Banjarnegara, tradisi “botoh” memiliki peranan penting dalam proses pemilihan kepala desa, menciptakan nuansa yang khas dalam interaksi antara calon pemimpin dan masyarakat. Tradisi ini mengharuskan calon kepala desa untuk *sowan*, yaitu mengunjungi rumah-rumah warga dengan tujuan menyampaikan visi dan misi mereka secara langsung. Pendekatan ini, menurut data survei lokal tahun 2023, berhasil meningkatkan keterlibatan warga dalam pemilihan sebesar 20% dibandingkan metode kampanye terbuka (Putra, 2023). Tradisi “botoh” ini menjadi kearifan lokal dan memiliki taraf toleransi yang berbeda di setiap daerahnya disesuaikan dengan tradisi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masing-masing daerah. Di luar itu, BAPEMDA harus selaras dengan pemerintah pusat dalam menentukan aturan dan tata tertib pemilihan kepala daerah.

Perencanaan dan Pengorganisasian, BAPEMDA membantu merencanakan dan mengorganisasi kegiatan pemilihan umum, termasuk penyusunan jadwal dan tahapan pemilihan. Sirkulasi elektoral di desa tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum di pusat-pusat daerah. Perencanaan BAPEMDA searah dan satu tujuan dengan masyarakat desa itu sendiri. Peran KPU dan BAWASLU perlu sejalan dengan perencanaan dan pengorganisasian dari BAPEMDA itu sendiri. Selanjutnya dengan peran koordinator, BAPEMDA berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan lancar dan sesuai regulasi.

Mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan, pentingnya partisipasi politik masyarakat, dan bagaimana cara menggunakan hak suara dengan benar. Selain menjalankan fungsi sosialisasi, BAPEMDA menjalankan peran pengawasan, pengawasan yang dimaksud disini adalah turut serta mengawasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Banjarnegara agar berjalan sesuai dengan prinsip pemilu itu sendiri yaitu LUBERJURDIL dan memastikan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.

BAPEMDA juga mengumpulkan dan menganalisis data pemilih serta hasil pemilihan untuk memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan di tingkat daerah. Peran-peran ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan demokrasi di tingkat desa dan memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik.

Tantangan BAPEMDA

Badan Permusyawaratan Desa (BAPEMDA) memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala desa di Banjarnegara, terutama untuk memastikan bahwa

pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup kompleks, termasuk adanya indikasi gratifikasi, suap, dan pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi independensi BAPEMDA.

Berdasarkan hasil survei dari Pusat Studi Pemerintahan Daerah (2023), sekitar 40% warga desa percaya bahwa interaksi antara calon kepala desa dan BAPEMDA sering kali tidak bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan yang berakar pada hubungan antara anggota BAPEMDA dan calon kepala desa, yang sebagian besar memiliki latar belakang kedekatan sosial maupun keluarga dengan anggota BAPEMDA.

Indikasi adanya gratifikasi dan suap dalam proses pengawasan ini juga diperkuat oleh laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi lokal, yang menemukan bahwa dalam pemilihan kepala desa terakhir, sekitar 25% dari anggota BAPEMDA diduga menerima hadiah berupa uang atau fasilitas dari calon tertentu (Rahardjo, 2022). Praktik ini tidak hanya mengganggu prinsip netralitas dalam pengawasan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan warga terhadap independensi BAPEMDA. Temuan tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Institut Pengawasan Desa (2023), yang mencatat bahwa dalam 15% kasus pemilihan kepala desa di Banjarnegara, calon kepala desa secara langsung atau melalui perantara menawarkan bentuk bantuan finansial atau material kepada anggota BAPEMDA dengan harapan dapat mengamankan dukungan atau setidaknya meredam pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran dalam kampanye.

Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa BAPEMDA kurang memiliki instrumen dan mekanisme yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan suap dalam proses pengawasan. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2023), sekitar 60% anggota BAPEMDA di Banjarnegara mengakui bahwa mereka tidak memiliki pedoman etika atau

prosedur standar operasional yang jelas dalam menangani potensi konflik kepentingan dan dugaan gratifikasi. Ketidakjelasan pedoman ini menimbulkan kesulitan dalam menindaklanjuti laporan atau kecurigaan warga mengenai pelanggaran yang terjadi. Pada akhirnya, kelemahan institusional ini menjadikan BAPEMDA rentan terhadap tekanan eksternal dan mempersulit mereka untuk menegakkan pengawasan yang transparan dan bebas dari intervensi.

Ketergantungan finansial anggota BAPEMDA juga menjadi faktor yang turut memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Jenderal Soedirman (2023), mayoritas anggota BAPEMDA di desa-desa kecil, termasuk Banjarnegara, tidak menerima kompensasi yang memadai untuk waktu dan tenaga yang mereka curahkan dalam tugas pengawasan. Sebanyak 75% anggota BAPEMDA menyatakan bahwa keterbatasan insentif ini membuat mereka lebih rentan menerima tawaran dari calon yang bersedia memberikan imbalan finansial. Hal ini tidak hanya menurunkan kredibilitas BAPEMDA, tetapi juga melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara profesional dan independen.

Dalam beberapa kasus, anggota BAPEMDA bahkan dilaporkan turut terlibat dalam mengarahkan warga untuk mendukung calon tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dengan mereka. Laporan dari Yayasan Desa Bersih (2023) menyebutkan bahwa terdapat indikasi bahwa sebagian anggota BAPEMDA secara aktif mengarahkan warga untuk memilih calon kepala desa tertentu dengan imbalan fasilitas tertentu, seperti bantuan sosial atau janji peningkatan akses layanan dasar. Praktik seperti ini menandakan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BAPEMDA tidak

sepeuhnya bebas dari pengaruh politik atau kepentingan individu.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya reformasi kelembagaan yang lebih komprehensif, termasuk pemberian pelatihan etika dan peningkatan kapasitas pengawasan bagi anggota BAPEMDA. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dengan menetapkan pedoman dan kode etik yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota BAPEMDA memahami batas-batas profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peningkatan kompensasi bagi anggota BAPEMDA juga dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada calon kepala desa yang berpotensi memberikan pengaruh negatif. Menurut Rahayu (2023), peningkatan insentif dan tunjangan bagi BAPEMDA terbukti dapat mengurangi potensi gratifikasi dalam pengawasan di beberapa desa lain yang telah mengadopsi kebijakan ini.

Tantangan yang dihadapi BAPEMDA di Banjarnegara mencerminkan adanya kerentanan kelembagaan yang dapat menghambat fungsi pengawasan mereka dalam pemilihan kepala desa. Meskipun secara struktural BAPEMDA memiliki wewenang yang memadai, kelemahan dalam pengaturan etika, keterbatasan insentif, dan kurangnya instrumen pengawasan yang kuat menyebabkan mereka rentan terhadap intervensi dan praktik gratifikasi. Tanpa adanya perbaikan signifikan, BAPEMDA berisiko kehilangan legitimasi di mata warga desa, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

SIMPULAN

BAPEMDA mempunyai peran strategis dalam menjamin perdamaian dan keadilan pemilu di Desa Banjarnegara. Sebagai instrumen pemerintahan daerah, BAPEMDA menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang sesuai prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Namun, pelaksanaan fungsi ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan, termasuk indikasi gratifikasi, konflik kepentingan, keterbatasan

mekanisme pengawasan, dan kurangnya kompromi yang memadai bagi anggotanya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa potensi gratifikasi dan suap masih menjadi masalah signifikan yang mengancam independensi BAPEMDA. Hal ini diperburuk oleh ketiadaan pedoman etika yang jelas dan minimalnya instrumen pengawasan yang efektif. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas BAPEMDA, yang pada akhirnya dapat menghambat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang mencakup penyusunan pedoman etika, peningkatan pelatihan, serta pemberian insentif yang layak bagi anggota BAPEMDA. Langkah-langkah ini penting untuk mengembalikan legitimasi dan profesionalisme BAPEMDA dalam menerapkan pengecualian sebagai pengawas pemilu. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi di Desa Banjarnegara dapat terjamin, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi inti dari proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. *Rineka Cipta*.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2023). Laporan tahunan: Efektivitas pengawasan desa. Banjarnegara: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Badan Pusat Statistik Banjarnegara. (2023). Data demografi Desa Banjarnegara tahun 2023. Banjarnegara: BPS Banjarnegara.
- Bogdan, & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research For Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang

- pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, 37(1), 15.
- Hardiman, Budi F. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ Dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jurgan Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Institut Pengawasan Desa. (2023). *Studi kasus pengawasan pemilihan kepala desa di Banjarnegara*. Yogyakarta: Institut Pengawasan Desa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Pusat Studi Pemerintahan Daerah. (2023). *Survei persepsi warga terhadap transparansi pemilihan kepala desa*. Jakarta: Pusat Studi Pemerintahan Daerah.
- Putra, H. (2023). *Dampak pendekatan sowan dalam meningkatkan keterlibatan warga pada pemilihan kepala desa*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Rahardjo, T. (2022). *Analisis indikasi gratifikasi dalam pemilihan kepala desa di Banjarnegara*. Semarang: Yayasan Anti Korupsi Daerah.
- Rahayu, L. (2023). *Pengaruh peningkatan insentif terhadap integritas BAPEMDA*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Desa.
- Sari, R. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Warga*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suharno, B. (2022). *Tradisi Lokal dan Demokrasi: Kasus Desa Banjarnegara*. *Jurnal Politik dan Budaya*.
- Suryadi, M. (2022). *Peran BAPEMDA dalam pengawasan pemilihan kepala desa di Banjarnegara*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Tata Kelola Desa.
- Setiawan, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Desa: Analisis Kasus Banjarnegara*. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Universitas Jenderal Soedirman. (2023). *Studi tentang kompensasi BAPEMDA di desa-desa kecil di Banjarnegara*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Yayasan Desa Bersih. (2023). *Laporan pemantauan independensi BAPEMDA dalam pemilihan kepala desa*. Bandung: Yayasan Desa Bersih.